



RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI MALUKU PASCA REFORMASI

Ernita Krisandi¹, Budi Setyono S.Sos, M. Pol. Adm², Tri Cahyo Utomo, MA³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

A horizontal conflict occurred in Maluku between Christian and Moslem during the last decade. There are a lot of reasons to explain why it could happen such economics and political problems which are connected to ethnic group sentiment. In 1999 conflict explode at the first time caused a lot of victims and damage in many public facilities, until 2011 there were more conflicts with the same pattern happened in Maluku. Since then, conflict resolution were conducted by a lot of parties, Government, NGO, customary institutions, and others grass root movement. Maluku get better from day to day, but it took long time but the situation remains fragile. The conflict worsen social segregation which is inherited by colonial governments. Poor commitment and professionalism of the law enforcement officers (police, TNI) to realize peace and security caused the conflict continually persistent. Furthermore, some of the local political actors get some advantages from the conflicts to get and save their interests. This paper describes the conflict and seek to find resolutions formula that can make integration and justice to all Maluku peoples.

Key Words : conflict, social movement, peace building

Abstraksi

Konflik Maluku merupakan konflik horizontal yang terjadi penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik ini dipicu oleh banyak faktor, seperti ekonomi dan politik yang kemudian dibawa dalam ranah sentimen ras dan agama. Konflik pertama kali terjadi pada tahun 1999 dan menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan infrastruktur lainnya, hingga 2011 lalu di Maluku masih terjadi kerusuhan yang melibatkan dua kelompok beda agama tersebut. Berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh banyak kalangan, Pemerintah, LSM, Lembaga Adat, dan gerakan akar rumput masyarakat lainnya yang terbentuk karena keprihatinan akan konflik yang berkepanjangan. Dari hari kehari Maluku semakin membaik, kerusuhan tidak lagi sebanyak pada tahun – tahun pertama hingga tahun ke – 3 konflik, akan tetapi bukan berarti konflik sudah sama sekali tidak terjadi. Segregasi sosial yang menjadi warisan peninggalan Belanda belum bisa dihilangkan dan semakin tajam dengan adanya konflik antar kedua suku agama tersebut. Komitmen aparat penegak hukum setempat untuk menjaga keamanan dengan profesionalitas yang tinggi kurang dapat diwujudkan dengan baik. Elit politik lokal setempat tak sedikit yang memanfaatkan konflik sebagai cara untuk mencapai atau melindungi kepentingan mereka. Maluku butuh sebuah formulasi penanganan konflik yang dapat mendorong tercapainya sebuah integrasi dan keadilan yang merata bagi penduduknya.

Kata Kunci: konflik, gerakan soaial, resolusi konflik

¹ Ernita Krisandi adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang alamat email : ernitakrisandi@ymail.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara majemuk, negara yang kaya akan perbedaan. Beragam suku bangsa hidup bersama di negara ini. Karakter yang heterogen ini tentu memunculkan pola kepentingan masyarakat yang beragam pula. Beragam kepentingan ini tidak selalu dapat berjalan beriringan. Kepentingan yang satu seringkali berbenturan dengan kepentingan lainnya. Ketika hal ini terjadi pada pihak – pihak yang tidak dapat menerima perbedaan dengan baik, maka sudah pasti yang terjadi adalah konflik. Pasca jatuhnya presiden Soeharto memang banyak sekali konflik horizontal maupun vertikal terjadi di Indonesia. Salah satunya yang tergolong konflik berkepanjangan adalah konflik di Maluku. Maluku merupakan sebuah daerah dimana daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan konflik yang sangat tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat Maluku adalah masyarakat yang heterogenitas etnik dan agamanya cukup tinggi. Tidak hanya penduduk asli Maluku, pendatang dari berbagai kawasan Indonesia, terutama Bugis, Buton, Makasar, Minahasa, Jawa dan Cina juga mendiami wilayah ini. Dari segi agama, Islam dan Kristen adalah agama mayoritas penduduk Maluku, kemudian ada Katolik, Hindhu dan Budha. Dahulu, mereka hidup rukun berdampingan, Akan tetapi hal ini berubah ketika awal tahun 1999, dimana hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Maluku berubah menjadi ladang konflik yang komunal dan berdarah.

Konflik yang terjadi di Maluku hingga saat ini masih sering memunculkan kerusuhan – kerusuhan yang mengakibatkan pengrusakan. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang sama bahwa resolusi yang ada dan diterapkan tidak mampu memadamkan persoalan yang sebenarnya terjadi hingga pada tataran akar rumput permasalahan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang ada di Maluku kemudian merumuskan sebuah alternatif penyelesaian konflik yang bisa diterapkan di Maluku. Melihat hal tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana konflik Maluku pada tahun 1999 dapat terjadi?, (2). Bagaimana bentuk – bentuk konflik yang terjadi di Maluku?, (3). Bagaimana upaya penyelesaian yang telah diberikan pada konflik Maluku 1999?, (4). Bagaimana model manajemen konflik yang tepat bagi masyarakat Maluku pada tataran akar rumput sehingga konflik bisa terselesaikan dan tidak kembali terulang?

B. Bahan dan Metodologi

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihilangkan. Selama masih ada kehidupan, selama itu pula konflik masih akan tetap ada. Stephen. P Robbins dalam Wirawan (2010 : 5), *we define conflict as a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by form of blocking that will result in “frustrating B” in attaining his goals or furthering his interest.* Hal ini berarti bahwa mendefinisikan konflik sebagai suatu proses dimana usaha yang sengaja dibuat oleh A untuk mengimbangi upaya B dengan bentuk yang sama memblokir yang akan menghasilkan B frustrasi dalam mencapai tujuannya dan melanjutkan kepentingannya. Pernyataan ini menekankan bahwa dalam suatu konflik ada unsur persaingan, kompetisi, dan usaha untuk menjatuhkan lawan.

Menurut Wirawan (2010:5), konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Istilah proses juga digunakan dalam pengertian konflik tidak terjadi seketika, melainkan memerlukan waktu dari terjadinya perbedaan sampai terjadinya konflik. Pihak yang terlibat konflik saling tergantung atau interdependen satu sama lain. Artinya, setiap tindakan atau tidak melakukan sesuatu dari salah satu pihak yang terlibat konflik akan berpengaruh pada pihak lainnya. Menurut sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1). Konflik Vertikal, merupakan konflik antara elite dan massa. Elite disini bisa diartikan sebagai pemerintah, atau para pengambil kebijakan di tingkat pusat, kelompok bisnis, atau aparat militer. (2). Konflik Horizontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok/wilayah yang didasarkan pada etnis, aliran kepercayaan, isu ekonomi, isu solidaritas, dan isu sosial lainnya. Konflik ini mengemuka di beberapa daerah di Indonesia, seperti suku Jawa dan suku – suku lain di luar pulau Jawa.

Konflik etnis terjadi ketika banyak kelompok – kelompok suku saling berintegrasi dan etnosentrisme menjadi ancaman utama bagi proses integrasi sosial. Konflik dan kekerasan antar

kelompok yang telah terjadi berulang kali justru mempertebal rasa etnosentrisme itu, terbentuklah citra bahwa “kelompok suku saya hebat dan kelompok suku lain jahat, atau kelompok suku lain kejam dan kelompok suku saya menjadi korban kekejaman”. Etnosentrisme ini memiliki akar pada stereotype negatif tentang kelompok suku lain.

Setiap konflik selalu mengalami dinamika yang terdiri dari tahapan – tahapan. Pada dasarnya tahapan konflik terdiri dari pra konflik, konfrontasi, krisis yang merupakan fase puncak dari konflik, dan kemudian menurun menjadi pasca konflik. Konflik massal seperti digambarkan jenisnya diatas, tidak serta merta terjadi. Selain mengalami tahap – tahap yang sudah dijelaskan diatas, terkadang ada juga faktor eksternal yang sering membuat konflik menjadi berkembang. Dalam prosesnya, pasti ada hal – hal yang telah lama terpendam dan kemudian menjadi bom waktu yang meledak pada satu titik waktu tertentu. Selama proses itu, tentu banyak sekali faktor – faktor yang mempengaruhinya sehingga konflik besar membesar. Faktor itu bisa dikatakan sebagai faktor penyemarak konflik. Faktor penyemarak seringkali datang dari kurang tepatnya atau kurang profesionalnya tindakan aparat yang menyebabkan konflik semakin membesar.

Penanganan konflik yang tepat diberikan dalam fase awal konflik, akan membuat siklus konflik terhenti dan tidak akan berkembang ke tahap selanjutnya. Manajemen konflik adalah upaya menggabungkan beberapa metode seperti pencegahan konflik, resolusi konflik, atau transformasi konflik (Miall : 2002 : 22–24). Manajemen konflik penting karena adanya kebutuhan pada bukan sekedar menghilangkan konflik tetapi bagaimana membawa pihak – pihak yang bertikai ke dalam sebuah proses kooperatif serta bagaimana merancang sistem kooperatif untuk mengelola perbedaan yang konstruktif (Haris dan Reilly: 2000 : 20). Penyelesaian konflik horizontal antarkelompok sosial dan etnik harus didasarkan pada pengelolaan kelompok – kelompok yang ada. Konsep pengelolaan konflik seperti ini harus memperhitungkan efektivitas interaksi sosial yang memungkinkan untuk membangun suatu pola hubungan yang terbuka dan mengurangi label – label negatif di antara kelompok yang berinteraksi.

Penelitian ini ditujukan untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan konflik, terutama hal – hal yang menjadi akar permasalahan berbagai konflik komunal yang pernah terjadi di Indonesia untuk kemudian di analisis dan dipetakan sebuah solusi yang ideal untuk mengatasinya. Oleh karena keperluan tersebut maka dipilihlah sebuah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini fokus pada pada proses penyelesaian konflik yang ada di daerah Maluku. Konflik ini dipilih karena dilihat dari ekskalasinya, konflik ini tergolong konflik yang paling besar serupa dengan tragedi kemanusiaan, yang meninggalkan banyak kerugian jiwa, harta benda, serta trauma dan hubungan yang masih kurang harmonis sampai saat ini. Selain itu, melihat kondisi sekarang ini yang menunjukkan bahwa konflik di Maluku masih sering terjadi, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti mengenai bagaimana proses resolusi konflik diberikan. Konflik ini sudah berlangsung, oleh karena itu penelitian ini menggunakan data – data dokumentasi yang ada dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber yang pernah ikut dalam proses rekonsiliasi konflik Maluku.

D. Pembahasan

Cerita sejarah menunjukkan bahwa konflik Maluku tidak bisa dipungkiri lagi merupakan warisan kolonial Belanda yang mengendap dan dapat meledak sewaktu – waktu. Kondisi perekonomian dan perpolitikan di negeri ini menjadi reaktor yang dapat meledakan potensi konflik ini sewaktu – waktu. Pada awal meletusnya konflik Maluku 1999, keadaan ekonomi politik di Indonesia belum stabil akibat reformasi yang terjadi pada Mei 1998. Krisis ekonomi dan perombakan dalam seluruh sistem dan budaya birokrasi di negeri ini mewarnai keadaan saat itu. Beberapa masalah yang kemudian dirumuskan menjadi akar penyebab konflik Maluku digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Dimensi Isu

Dimensi Isu	Komunitas Islam	Komunitas Kristen
Pekerjaan/ekonomi	Muslim disisihkan dari birokrasi	Islamisasi birokrasi, Penganakemasan etnis BBM Muslim dan usaha dagang
Politik	Separatisme RMS, mengurangi jumlah pemilih partai Islam	Penerapan piagam Jakarta, banyaknya cendekiawan muslim yang mendapatkan jabatan
Keagamaan	Oikumene, dominasi symbol – symbol agama Kristen di Kota Ambon, kebebasan praktik beragama ditekan	Fundamentalisme dan radikalisme Islam nasional
Pendidikan	Dianaktirikan Pemerintah	Gerakan Islamisasi

Sumber : Susan (2010:164)

Tabel diatas menunjukkan bagaimana permasalahan – permasalahan paten yang menjadi akar dari konflik Maluku. Selain permasalahan – permasalahan seperti diatas, ada juga faktor – faktor yang menjadi penyemarak berkembangnya konflik di Maluku. Seperti norma norma adat Maluku yang sudah mulai luntur. Maluku memiliki ikatan adat yang disebut dengan ikatan pela gadhong, atau persaudaraan antar desa – desa di Maluku. Desa – desa yang memiliki ikatan ini tidak boleh saling menyakiti apalagi menyerang. Akan tetapi pada saat konflik berlangsung ikatan ini juga tidak mampu menahan masyarakat Maluku untuk tidak saling melakukan penyerangan. Hal ini sebabkan karena konflik Maluku yang terjadi antara desa – desa Islam dan Kristen tersebut juga dilatarbelakangi oleh konflik antara pendatang yang umumnya mereka beragama Islam dengan penduduk asli Maluku yang umumnya beragama Kristen. Bagi para pendatang mereka merasa tidak memiliki ikatan tentang ikatan adat pela gadhong tersebut sehingga mereka tidak mematuhi adat istiadat yang sudah lama ada di tanah Maluku tersebut.

Selain itu faktor penyemarak datang dari isu – isu yang beredar seputar bangkitnya RMS. RMS merupakan sebuah gerakan yang menuntut kemerdekaan di Maluku. Gerakan ini diduga berada di kubu kelompok Kristen, sementara di kubu Islam sempat datang kirimin pasukan laskar jihad dari seluruh penjuru tanah air yang datang ke Maluku untuk membela saudara – saudara Muslim mereka. Pengumpulan pasukan antar kedua kubu ini menambah eksplosivitas konflik Maluku semakin hari semakin membesar. Ditambah dengan aparat penegak hukum yang kurang professional dalam menangani konflik di Maluku. Tak sedikit dari temuan – temuan penelitian yang menyatakan kasus – kasus penyimpangan aparat, dan keberpihakan aparat terhadap salah satu kelompok.

Memahami perjalanan panjang konflik Maluku akan mudah apabila membaginya dalam rentang periode waktu. Tahap pertama, Periode pertama konflik Maluku terjadi sekitar Bulan Januari – April 1999. Cerita ini berawal dari kisah pelemparan ternak milik warga Desa Tawiri yang kemudian dibalas oleh tindakan pelemparan rumah warga Desa Bak Air yang mayoritas merupakan warga Muslim. Cerita lain berasal dari Kampung Wailete, dimana sebagian besar penduduknya adalah etnis Buton dan Bugis. Mereka sedang mengadakan pesta perkawinan, dan salah satu anggota prajurit melanggar adat dengan berjoget menggunakan topi. Teguran kepada prajurit ini kemudian berujung perkelahian. Desa Wailete diserang oleh sekelompok orang yang berasal dari Desa Hative Besar (Yanuarti, 2003 :55). Satu lagi cerita awal mula konflik Maluku 1999 yang sangat tenar dikalangan media pada saat itu. Peristiwa Hari Raya Idul Fitri pada Januari 1999 itu menjadi gong peperangan bagi masyarakat Maluku. Bermula dari pemalakan Nursalim, oleh Yopi Louhery, seorang supir angkot jurusan Batu merah. Kejadian ini

kemudian berujung pada perkelahian antar kelompok. Teriakan minta tolong Nursalim, membuat masa Islam di Desa Batu Merah keluar, dan tidak lama kemudian puluhan rumah di wilayah Mardika sudah habis dilalap api. Begitu juga yang dilakukan oleh masa Kristen dari Kuda mati dan Batugantung yang kemudian keluar membawa senjata tajam dan mulai menyerang desa – desa Islam (Triyono, 2004:109).

Konflik terus meluas dan menyebar, tindakan aparat keamanan tidak dapat secara efektif menghentikan konflik. Berdasarkan data Nurchasim dan Ratnawati (2005 : 98) yang diolah dari Harian Kompas (1999) pada periode ini (Januari – Maret 1999) Pemerintah telah mengerahkan sekitar 5300 aparat, baik dari Brimob maupun TNI. Jumlah aparat yang sedikit ini kurang dapat membendung konflik yang sangat impulsif. Hal ini disebabkan karena pada saat itu Pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mengamankan wilayah Timor – Timor menjelang jajak pendapat Agustus 1999 sehingga lebih banyak jumlah personil yang dikirim ke Timor - Timor. Kerusuhan Yopie – Salim ini terus melebar hingga keluar kampung Batu merah. Isu akan dibakarnya masjid Al – Fathah dan Gereja Silo membuat kedua kelompok masa berkumpul dan bersiaga untuk menghadapi penyerangan. Memasuki pertengahan April konflik pada periode ini mulai menunjukkan intensitas menurun. Kobaran api perang sudah tidak banyak terlihat. Pada masa ini masyarakat Maluku sedang disibukan oleh euphoria Pemilu 1999.

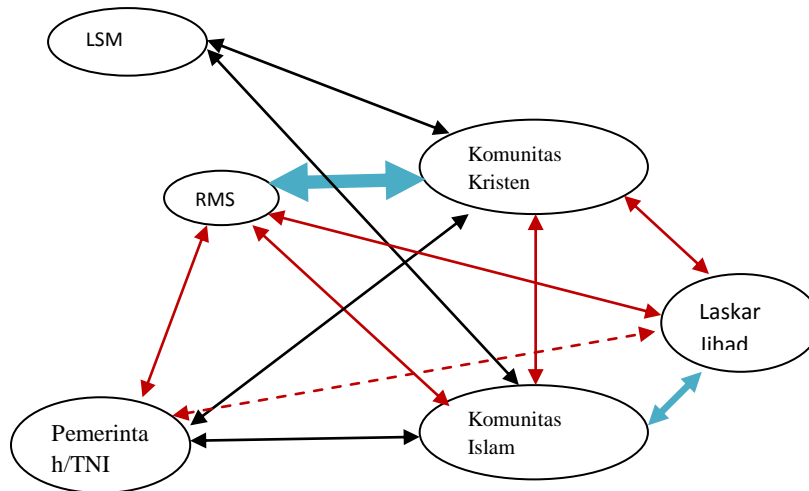
Pada periode kedua konflik terjadi setelah Pemilu 1999 selesai dilaksanakan. Kemenangan mutlak PDI – P (54,29%) di Ambon tidak bisa lepas dari pengaruh mobilisasi penduduk ketika eskalasi konflik mulai meningkat. Ditengarai bahwa upaya untuk memenangkan PDI – P di Maluku telah menyebabkan terusirnya warga BBM dari Maluku Tengah. Upaya kelompok Kristen untuk memperoleh kembali posisi kunci di pemerintahan melalui PDI – P telah memunculkan kembali bibit – bibit konflik di Maluku. Ini merupakan fase awal dimulainya periode kedua dalam perjalanan panjang konflik Maluku. Masyarakat berjuang untuk membela agamanya masing – masing sementara di kubu aparat keamanan yang dari awal sering diisukan terlibat dalam kerusuhan, pada masa ini semakin terlihat jelas keterlibatannya, karena pada masa ini aparat juga telah terbagi dalam garis agama. TNI yang pada masa Orba dekat partai – partai pemerintah dianggap lebih memihak Islam, sementara polisi dekat dengan Kristen dengan keadaan seperti ini sudah pasti aparat keamanan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Periode ketiga konflik Periode ke III ini dapat dikatakan bahwa setiap detik kejadian sudah merupakan fase krisis. Karena pertempuran besar hampir setiap hari terjadi. Dari keseluruhan kisah panjang konflik Maluku fase krisis dimulai pada awal Desember 1999 hingga 2004, inilah yang merupakan puncak eskalasi konflik. Penelitian dari *Centre For Humanitarian Dialogue* (2011 : 18) menyebutkan bahwa konflik ini mencapai puncaknya pada 26 Desember 1999 terjadi penyerangan terhadap Gereja Silo di perkampungan Tobelo. Gereja Silo adalah gereja terbesar di tengah pusat kota di Ambon dan habis ludes terbakar setelah perayaan Natal. Pemicunya adalah hilangnya jenazah seorang anak Raja yang diserempat di Jalan Tamaela. Akibat kejadian ini muncul gelombang massa yang berkumpul di depan Gereja Silo menuntut dikembalikannya jenazah anak tersebut. Massa kemudian menjadi mengamuk tidak terkendali ketika muncul penembak misterius (sniper) dari atap – atap gedung disekitar Gereja Silo. Masih pada hari yang sama, hampir 800 orang Muslim di desa Tobelo dibunuh oleh pihak Kristen. Serangan itu akhirnya membuat pihak Islam dan Kristen terlibat konflik lebih jauh. Korban masyarakat sipil semakin banyak jumlahnya, desa – desa diserang, Gereja, dan Masjid juga banyak yang ludes terbakar.

Periode baru dalam konflik dimulai ketika laskar jihad mulai berdatangan ke Maluku. Masuknya Laskar Jihad ke Maluku yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib dengan 10.000 pasukan menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara kelompok Islam dan Kristen. Mereka merupakan pasukan yang memang sengaja dibentuk, dipersiapkan dengan dibekali pelatihan kemiliteran sebelumnya, dilengkapi senjata yang lebih modern dan memiliki dukungan dana yang kuat. Hal ini tentu saja memperjelas ketidakseimbangan antara kedua kelompok. Dengan masuknya Laskar Jihad ini, kelompok Kristen semakin terdesak keadaan di Maluku juga semakin parah. Ditambah lagi dengan sikap aparat keamanan yang terpancing untuk ikut melakukan pembelaan terhadap masing – masing kelompok. Munculnya RMS akibat dari kekecewaan dengan pemerintah yang dianggap tidak mampu mengelola konflik dengan baik, mendorong Alex Manuputty untuk mendeklarasikan berdirinya FKM (Front Kedaulatan Maluku).

Suasana di Maluku semakin kacau, semua maskapai penerbangan menghentikan segala aktifitasnya di Maluku. Pihak – pihak yang berkonflik semakin banyak dengan datangnya Laskar Jihad ke Maluku. Hingga periode krisis ini hubungan masing – masing pihak yang berperan dalam konflik Maluku dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 1. Pola Hubungan Konflik Maluku



Sumber : Susan (2009:164)

Serangan masih terus berlanjut, pemisahan golongan masyarakat semakin jelas, bantuan logistik dari luar sudah tidak ada lagi yang datang untuk itu sulit bagi masyarakat sipil Maluku baik Islam maupun Kristen memperoleh logistik sehingga semakin hari intensitas konflik semakin menurun. Momentum penurunan intensitas akibat kekurangan logistik ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendekati masyarakat dan menawarkan perundingan perdamaian. Februari 2001 pemerintah mempertemukan dua kubu di Sulawesi Selatan dengan agenda untuk melaksanakan perundingan perdamaian yang menghasilkan perjanjian Mallino II. Meskipun tidak memberhentikan sepenuhnya, akan tetapi perjanjian ini cukup meredam konflik – konflik yang terjadi.

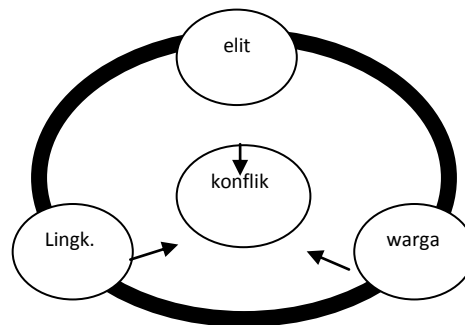
Suasana di Maluku berangsur – angsur tenang, kehidupan sosial ekonomi perlahan mulai berjalan dengan masuknya berbagai elemen yang mencoba memulihkan kembali keadaan Maluku. Akan tetapi hal ini bukan berarti konflik sudah tidak terjadi, ini merupakan periode baru konflik Maluku, yaitu periode kelima. Konflik dan aksi protes tetap masih sering terjadi tetapi intensitasnya sudah sangat menurun. Konflik yang cukup besar pasca Mallino II ini terjadi di Desa Soya, penyerangan dari orang – orang berseragam militer pada 28 April 2002 menyebabkan 12 orang terbunuh, rumah dan Gereja ludes terbakar. Konflik dianggap sudah berakhir akan tetapi perdamaian yang terjalin masih sangat rapuh, segregasi kelompok masyarakat juga masih sangat jelas. Mereka belum bisa hidup berdampingan. Jadi, perdamaian ini sekedar menenangkan keadaan, akar rumput dari permasalahan belum mendapat penanganan. Dominasi Muslim dalam dunia bisnis dan Kristen dalam dunia pendidikan merupakan masalah baru yang harus segera ditangani karena memang pada kenyataannya kedua belah pihak belum mampu hidup berdampingan.

Hingga 2011 lalu, di Maluku masih terjadi konflik antar kedua kelompok umat beragama. Konflik pasca Mallino II ini terjadi banyak dikarenakan tiga faktor utama yaitu faktor kepentingan elit, motivasi warga, dan faktor lingkungan yang mendorong konflik berkembang dengan subur di Maluku. Dalam motivasi elite menyebutkan bahwa kekerasan menjadi alat untuk mencapai tujuan – tujuan politik. Elite menekankan perbedaan agama dan ancaman (potensi) kelompok – kelompok keyakinan lain akan memobilisasi masa dalam aksi kekerasan, seringkali untuk kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini konflik

digunakan sebagai instrumental oleh sekelompok orang untuk mencapai keinginannya. Inilah yang menjadi penyebab konflik masih muncul pasca perjanjian Mallino II dari sisi motivasi elite.

Dari sisi motivasi warga pemisahan pemukiman menyebabkan ketidakpercayaan antar warga terus bertumbuh dikalangan masyarakatnya. Pengungsian dan segregasi masyarakat yang berkesinambungan, dan tidak adanya rekonsiliasi tingkat lokal yang efektif mengawetkan kecurigaan yang ada. Kondisi ini menjadikan relatif mudah bagi elite memanfaatkan ketakutan dan prasangka untuk menyulut kekerasan. Keberadaan preman – preman yang dahulu berperang terus memelihara hubungan erat dengan elite juga merupakan faktor penting. Kelompok – kelompok ini memanfaatkan struktur milisi yang dimobilisasi selama kekerasan berkepanjangan. Dengan begini, tersedia kelompok orang yang mudah dimobilisasi untuk melakukan kekerasan, apalagi jika uang ikut bermain.

Gambar 2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan Pasca Konflik



Sumber : Baron dkk (2012:40)

Dukungan diam – diam terhadap kekerasan oleh unsur – unsur aparat keamanan di Maluku pasca konflik menyediakan lingkungan yang membantu usaha – usaha elite dalam memobilisasi pengikut untuk melancarkan kekerasan. Oknum – oknum Polri dan TNI juga berperan dalam memulai beberapa insiden besar kekerasan. Buruknya kapasitas aparat juga berperan. Seperti yang diungkap Najib Azca (2006) dalam tulisanya “*In Between Military and Militia : The Dynamics Of The Security Forces In The Communal Conflict In Ambon*”, *Asian Journal of Social Science*, mengatakan bahwa aparat keamanan di Ambon dan Maluku Tengah terlibat dalam pemihakan selama kekerasan panjang. Dalam fase - fase awal konflik pasukan keamanan turut meningkatkan kekerasan dengan keberpihakan personel beragama Kristen dan Islam pada laskar seagama.

Serangkaian konflik yang terjadi di Maluku pada awal 1999 hingga 2002, dan dilanjutkan aksi kekerasan – kekerasan pasca perjanjian Mallino II yang dianggap sebagai perjanjian akhir perdamaian antara kedua belah pihak menyisakan banyak kisah – kisah miris.

Gambar 3. Piramida Dampak Konflik Maluku



Sumber : Yanuarti, 2005 : 57

Dari piramida tersebut diketahui bahwa sebenarnya korban non – fisik memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah korban fisik. Diperlukan sebuah metode berkelanjutan untuk mengembalikan keadaan sosial masyarakat Maluku yang sudah banyak dipaksa berubah oleh konflik. Akan tetapi untuk memulai memperbaiki keadaan sosial masyarakat, terlebih dahulu dampak – dampak fisik konflik harus direkonsiliasi terlebih dahulu.

Proses konflik sosial di Ambon melibatkan seluruh aspek masyarakat. Penyelesaian yang dilakukan sebelum Mallino II selalu bersifat reaktif dan belum menggunakan rencana jangka panjang. Dari awal pecahnya konflik Maluku, sudah banyak organisasi – organisasi non – pemerintah yang berdatangan untuk sekedar memberikan bantuan atau ada juga yang datang dengan membawa misi perdamaian. Kerjasama pada berbagai elemen yang ada di masyarakat menjadi sebuah hal yang sangat penting khususnya ketika negara sudah tidak mampu lagi berbuat banyak untuk menyelesaikan konflik.

Pihak pemerintah melakukan penanganan dengan cara mempersiapkan aparat keamanan dalam jumlah banyak. Gubernur Maluku telah membentuk sebuah tim yang terdiri dari gabungan para pemuka Agama, Islam, Kristen, dan Katholik. Mereka ditugaskan untuk membangun kerukunan antar umat beragama dan mencegah terjadinya konflik. Akan tetapi hal ini tidak berjalan efektif, karena pembelaan atas identitas kelompok masing – masing yang masih melekat kuat dalam pikiran para pemuka agama tersebut. Ketidakseriusan para pemimpin agama ini menjadi kendala, bahkan mereka diduga terlibat dalam konflik.

Cara lain ditempuh dengan menggunakan pendekatan adat. Pendekatan ini berupaya untuk menghidupkan kembali jalinan persaudaraan dan persatuan diantara masyarakat Maluku. Kegiatan ini banyak didukung oleh pemerintah dan LSM lokal. Salah satunya ada kegiatan *panas pela* yang dilakukan di Maluku tengah. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan adat pela gadhong kepada sejumlah pemuda dan aktivis. Tujuan dari kegiatan *panas pela* ini adalah menghidupkan kembali budaya pela gadhong pada desa – desa yang memiliki ikatan pela. Pada tahun 2007 dibentuk sebuah forum Raja – Raja adat yang kemudian mencetuskan Majelis Latupati Maluku (MLM). Majelis Latupati Maluku dilihat sebagai bentuk pengakuan kembali peran Raja dalam masyarakat. Raja adat disini memainkan peran sebagai mediator menyelesaikan konflik antar masyarakat yang berbeda mengingat masih besarnya pengaruh mereka untuk masyarakat Maluku.

LSM juga muncul sebagai mitra bagi Pemerintah untuk membangun kembali Maluku. Baik LSM asing maupun lokal berdatangan ke Maluku untuk ikut membantu proses rekonsiliasi. Konflik telah menarik LSM asing untuk memberikan bantuan ke Maluku, kehadiran LSM asing ini membuka peluang bagi LSM lokal sebagai pelaksana agenda – agenda dari LSM asing dan membuka peluang besar bagi LSM untuk mendapatkan dana dari para donor. Hal ini didorong oleh peraturan yang berlaku saat itu bahwa LSM menjadi prasyarat penyaluran dana proyek. Mereka berperan sebagai penyalur bantuan dan membantu pemulangan serta pemulihan pengungsi dengan sumber dana dari asing. Pasca Mallino II, ketika kontak fisik tidak lagi terjadi, fokus LSM berubah menjadi pemberdayaan dan pembangunan. LSM lokal yang masih aktif antara lain, yayasan Hualopu, YPPM (Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat). Sementara di wilayah Maluku Lembaga Maritim Indonesia Timur (Lemritindo), Yayasan Sanro, Bina Indonesia Timur (Bintim), Lammut (Lembaga Advokasi Masyarakat Maluku Utara), Lappan (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan beberapa LSM lainnya (Yanuarti, 2005 : 180). LSM – LSM ini bergerak dalam bidang yang berbeda – beda sesuai dengan visi misinya masing – masing. Misalnya LSM Salon, LSM ini bergerak di bidang konsep, LSM ini lebih sering mengadakan pelatihan dan seminar dan beberapa LSM asing seperti UNDP, MSF dan ICRC.

Pendekatan agama sudah sering diterapkan pada masyarakat Maluku, jauh sebelum konflik ini berkembang menjadi sebuah konflik besar yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Pada awal terjadinya eskalasi konflik periode pertama, pihak Kristen telah membentuk Tim Pengacara Gereja Sinode yang tugasnya melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap para pengungsi. Upaya lain diadakan pada tanggal 20 – 22 November 2001, dengan menggelar acara perkabungan dan doa bersama untuk menumbuhkan kesadaran warga akan banyaknya korban jiwa yang sudah berjatuh. Acara dilakukan di gereja – gereja, rumah, bahkan jalan raya. Namun hal ini sempat diartikan lain oleh kelompok Islam, mereka mengartikan kegiatan ini sebagai bentuk provokasi (Yanuarti dkk, 2001 : 129). MUI cabang

Ambon berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi, antara lain melalui keikutsertaan MUI dalam deklarasi yang intinya berupaya untuk menghentikan kerusuhan. MUI cabang Ambon pernah meminta Laskar Jihad untuk ditarik keluar dari Ambon. Selain itu mereka juga pernah mengupayakan kerja sama dengan GPM (Gereja Protestan Maluku) dan upaya ini mendapatkan kecaman keras dari pihak Islam fundamentalis. Upaya yang dilakukan oleh pihak Islam adalah dengan membentuk BIMM (Badan Imarah Muslim Maluku) yang dipimpin oleh Ustadz Ali Fauzi. BIMM merupakan upaya untuk menyatukan suara semua komunitas Muslim Maluku. Hal ini dilakukan dengan tujuan merekonsiliasi intern Islam. Namun BIMM memiliki tujuan lain yaitu membasmi RMS, sedangkan pembahasan upaya perdamaian dengan pihak Kristen sama sekali tidak dibahas.

Pendekatan lain yang pernah diterapkan pada saat proses rekonsiliasi konflik Maluku adalah pendekatan yang berbasis pada masyarakat lokal. Gerakan yang menjangkau hingga pada tataran akar rumput masyarakat ini banyak diprakarsai oleh LSM dengan tokoh masyarakat setempat, salah satunya adalah gerakan Baku Bae. Gerakan Baku Bae merupakan gerakan masyarakat sipil yang berperan aktif dalam upaya penghentian konflik Maluku. Gerakan lain yang diprakarsai oleh masyarakat lokal yang peduli terhadap korban – korban konflik adalah Jaringan Pendidikan Anak (JPA). Gerakan ini dimotori oleh kaum wanita dari masing - masing kelompok agama. GPP (Gerakan Perempuan Peduli) yang merupakan sebuah organisasi perempuan Kristen membuka diri dan merekrut kaum perempuan Islam untuk bekerjasama dalam proses penyebaran informasi, konseling, dan pelatihan bagi ibu – ibu dan kaum muda. Seperti halnya Baku Bae, kelompok ini melakukan proses rekrutmen secara diam – diam mengingat pada saat itu keadaan sangat tidak kondusif. Kaum perempuan ini sangat menyadari pentingnya jalur komunikasi internal antara kedua kelompok untuk menghindari provokasi dari pihak luar. Perempuan – perempuan ini terus melakukan aksinya dengan sosialisasi penghentian konflik, dan melakukan aksi demonstrasi kepada Gubernur Maluku untuk secara tegas memulangkan Laskar jihad.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai konflik Maluku ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi konflik antar etnis di Maluku yaitu: (a) faktor ekonomi, (b) faktor permasalahan politik terkait dengan penguasaan struktur birokrasi pemerintah setempat. (c) Melemahnya sistem adat pela gadhong, (d) adanya isu RMS dan Separatisme Maluku menjadi faktor penyemarak ditengah kobaran konflik Maluku. Konflik ini menjadi berkepanjangan ketika upaya penanganan tidak serius dilakukan, dan ada dukungan dari elit yang berkuasa, masyarakat, dan lingkungan yang memang berpotensi untuk berkembangnya konflik.

2. Terdapat bermacam – macam bentuk konflik. Dilihat dari pihak – pihak yang berkonflik yaitu penduduk asli Maluku (Kristen) dan penduduk pendatang (Islam), konflik Maluku ini termasuk dalam kategori konflik rasial.

3. Sejak awal upaya penanganan konflik tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, berbagai lembaga berupaya membantu dalam proses penanganan konflik antara LSM, lembaga adat, tokoh dan lembaga agama dan yang terakhir adalah inisiatif dari masyarakat setempat yang dinamakan gerakan akar rumput.

F. Rekomendasi

1. Membangun Sistem Kewaspadaan Dini (*Early Warning*)

- (a). Optimalisasi fungsi intelegen dan aparat di tingkat lokal. Secara rutin mengadakan pemantauan lapangan untuk mengetahui pergerakan sosial masyarakat sehingga dapat membaca dan mengantisipasi ketika ada gejala – gejala yang berpotensi menimbulkan konflik.

- (b). Mengembangkan sistem jaringan informasi yang tersebar di seluruh wilayah hingga menjangkau lapisan bawah masyarakat sehingga dapat terkumpul informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam mengambil suatu langkah kebijakan penanganan konflik secara lebih dini.

2. Penanganan Basis Sosial Kekerasan

(a). Sering diadakan kegiatan yang mempertemukan kedua kelompok, sehingga komunikasi yang efektif antar keduanya dapat terbangun. Misalnya kegiatan adat yang tidak memandang dari agama apa mereka berasal.

(c). Berusaha memutus identitas komunal salah satunya dari sekat – sekat politis. Di Maluku, usaha membagi – bagi pekerjaan dan sumber daya antara berbagai kelompok menjadi pertarungan kalah menang yang makin menajamkan ketegangan lokal dan garis perbedaan antara kedua kelompok. Elit akan mengembangkan hubungan patron-klien yang telah tercipta guna memelihara basis dukungan mereka yang biasanya dilakukan dengan menyentuh unsur – unsur keagamaan. Dalam jangka pendek perlu sering dilakukan diskusi membahas permasalahan ini dengan para elit politik, tokoh agama, dan kelompok masyarakat sipil di Maluku.

(d). Perlu ditingkatkan minat investasi bidang swasta sehingga tersedia banyak lapangan kerja dan masyarakat tidak hanya terpancang pada lapangan kerja sektor pemerintah.

(e). Truma Healing, langkah ini penting dilakukan untuk proses penyelesaian konflik jangka panjang. Dimana rasa dendam dan benci akibat melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh lawan dapat menjadi pemicu konflik di kemudian hari.

3. Profesionalisasi Aparat Keamanan

(a). Transparansi dalam mengumumkan hasil penyelidikan aparat. Hal ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan membangun dukungan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

(b). Tegas terhadap kelompok – kelompok (laskar) yang sering menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan mereka.

(c) Di sisi lain perlu dibentuk sebuah lembaga independen yang memantau kualitas kinerja polisi, pemeriksaan di pengadilan negeri untuk polisi yang melanggar hukum.

4. Penegakan Hukum

(a). Pemberian kepastian hukum.

Hak dan kewajiban masing – masing pihak harus dipastikan dengan jelas. Terlebih untuk menangani kasus – kasus mengenai sengketa lahan yang marak pasca konflik.

(b). Pengusutan terhadap pelaku kekerasan dan pengrusakan.

Tidak adanya pengusutan terhadap pelaku kekerasan membentuk sebuah persepsi kebal hukum atas perusuh – perusuh di Maluku. Pada akhirnya hal ini akan mempersulit rekonsiliasi dan menghasilkan lingkungan yang rawan konflik.

G. Daftar Pustaka

- Buchanan, Cate. 2011. *Pengelolaan Konflik Di Indonesia - Sebuah Analisis Konflik Di Maluku, Papua, dan Poso*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Centre For Humanitarian Dialogue
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antaretnik Di Pedesaan. Pasang Surut Hubungan Cina – Jawa*. Yogyakarta : LKiS Pelangi Aksara
- Hadi, Syamsul, dkk. 2006. *Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Ierawati, Awani, dkk. 2004. *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta : Grasindo
- Ismail, Nawari, dan Muhaimin AG. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung : Lubuk Agung
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Pieris, John. 2004. *Tragedi Maluku, Sebuah Krisis Peradaban*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Triyono, Lambang, dkk. 2004. *Potret Retak Nusantara*. Yogyakarta : Centre Studies Peace and Security (CSPS) Universitas Gajah Mada